

RELEVANSI NILAI-NILAI PIAGAM MADINAH DAN PENDIDIKAN ISLAM PADA ERA MULTIKULTURAL DI INDONESIA

Satria Amir Makmun Gunawan

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

satriaamakmun@gmail.com

Akhmad Nurul Kawakip

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

akhmad.nurul@pai.uin-malang.ac.id

Abstract: Multicultural problems that often arise in Indonesia are conflicts between religions and within religions themselves. Various kinds of religious conflicts have adorned social life in Indonesia as a pluralistic country. These problems arise due to internal factors of bigotry of the religious adherents themselves, while external factors arise from various aspects, such as political, economic and social. This research aims to find out 1) History and multicultural values in the events of the Medina charter, 2) The role of an independent curriculum in implementing multicultural education; and 3) The relevance of multicultural education values in the events of the Medina charter and the independent curriculum for Islamic education in the multicultural era. This research uses a qualitative research

approach with the type of library research by collecting various sources of information, both from books, journal articles, reports and other sources of information that can support a comprehensive understanding of the research topic. The results showed that 1) The event of the Medina charter is a form of the Prophet Muhammad's serious efforts in realizing the value of tolerance. Where the purpose of the Prophet Muhammad SAW migrated to Medina for the mission of peace and justice for the people of Medina; 2) Strengthening the Pancasila Student Profile (P5) is an effort to internalize an understanding of the concept of multiculturalism, especially those contained in one of the main dimensions of the P5 program, namely the "Global Diversity" dimension; and 3) The multicultural values of the Medina charter event and the independent curriculum have a strong relevance by prioritizing multicultural principles that teach the value of unity, democratic values, tolerance values, equal rights values, as well as the value of empathy and sympathy for multi-ethnic and multi-religious diversity.

Keywords: Relevance, Medina Charter, Independent Curriculum, Multicultural, Islamic Education

Pendahuluan

Kemajemukan bangsa Indonesia bukan lagi menjadi suatu kebaruan yang terjadi di Indonesia saat ini. Indonesia sejak lama telah berdasarkan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang menjadi dasar persatuan dan kesatuan Indonesia. Dimana Indonesia terdiri dari 38 provinsi yang memiliki berbagai macam budaya, suku, bahasa maupun agama yang berbeda-beda, serta dapat hidup berdampingan dan hidup rukun satu sama lain. Karena, memiliki sikap saling menghargai dan toleransi bermasyarakat yang tinggi.¹

Fay Brian menjelaskan bahwa multikulturalisme menjadi tumpuan dalam membangun masyarakat multikultural. Karena, multikulturalisme merupakan suatu ideologi yang mengakui dan memahami perbedaan dalam kesederajatan. Baik secara individu maupun kebudayaan. Sehingga, implementasi pendidikan multikultural di Indonesia dewasa ini

¹ Monica Kurnia Wati, Juwita Melati Sukma, and Asiyah Asiyah, “Teori Pendidikan Multikultural Dan Pendekatan Pendidikan Multikultural,” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 1 (2024): 65–66, <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>; Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, “Kemajemukan Bangsa Indonesia,” 2016, <https://uin-malang.ac.id/r/160701/kemajemukan-bangsa-indonesia.html>.

diharapkan mampu mencapai tujuan negara berkedaulatan, yaitu berperikemanusiaan, perdamaian dan mampu membawa perdamaian abadi di sisi tuhan yang maha esa.²

Pendidikan berperan sebagai sarana dalam mengembangkan sumber daya manusia agar mampu memperoleh kemampuan sosial, serta perkembangan individu yang optimal dengan mampu memberikan relasi yang kuat antara individu dengan masyarakat dan lingkungan budaya sekitarnya. Selain itu, tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia, yang diharapkan manusia mampu memahami dirinya sendiri, orang lain, alam dan lingkungan budaya sekitarnya. Hal ini merupakan pijakan untuk pendidikan yang tidak bisa lepas dari budaya yang melingkupinya, serta harus memiliki tujuan pendidikan yang mengasah rasa, karsa dan karya. Dimana banyak tantangan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, dikarenakan unsur perbedaan budaya.³

Keterkaitan antara pendidikan dan multikultural merupakan solusi dalam memahami realitas budaya yang beragam, serta sebagai proses dalam mengembangkan seluruh potensi manusia agar mampu menghargai keberadaan masyarakat yang pluralis dan heterogen sebagai konsekuensi atas keragaman budaya, etnis, suku maupun agama. Dimana pendidikan multikultural di Indonesia menjadi upaya penting dalam memahami kemajemukan tersebut.⁴ Terutama tugas bagi lembaga pendidikan Islam yang mengedepankan konsep kasih sayang “*rahmatan lil alamin*”.

Pendidikan Islam merupakan upaya dalam membentuk kepribadian muslim sesuai dengan petunjuk ajaran Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah mencapai keseimbangan untuk perkembangan kepribadian manusia secara menyeluruh, baik melalui latihan kejiwaan, kecerdasan, akal pikiran, perasaan serta panca indra yang dimilikinya. Dimana tujuan akhir pendidikan Islam adalah pembentukan akhlak mulia dan menguatkan keimanan kepada Allah yang berdasarkan tuntunan ajaran Islam, yaitu Al-Qur’an dan Hadits.⁵

Pendidikan merupakan sarana dalam membentuk pola pikir dan perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Dimana dari sinilah,

² Muh Amin, “Pendidikan Multikultural,” *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 9, no. 1 (2018): 28–29, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/5020>; Yaya Suryana and A. Rusdiana, *Pendidikan Multikultural* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 99.

³ Rustam Ibrahim, “Pendidikan Multikultural: Pengertian, Prinsip, Dan Relevansinya Dengan Tujuan Pendidikan Islam,” *Jurnal Addin: Media Dialektika Ilmu Islam* 7, no. 1 (2013): 131, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/addin.v7i1.573>.

⁴ Ibrahim, 131–32.

⁵ Robiatul Awwaliyah and Hasan Baharun, “Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Telaah Epistemologi Terhadap Problematika Pendidikan Islam),” *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA* 19, no. 1 (2018): 37, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jid.v19i1.4193>.

peran pendidikan Islam harus diprioritaskan, karena Islam merupakan agama “*rahmatan lil alamin*” yang membawa konsep kasih sayang serta menjadi teladan untuk mengajarkan multikulturalisme agar saling menghargai dan menyayangi antar sesama manusia maupun alam semesta. Sehingga, nilai-nilai “*rahmatan lil alamin*” berperan penting dalam memahami dan menghargai masyarakat multikultural.⁶

Ajaran Islam mengajarkan kesetaraan dan kerukunan antar umat beragama, serta berperan sebagai agama penutup yang membawa pesan perdamaian dan nilai-nilai universal untuk umat akhir zaman. Paradigma Islam adalah membawa risalah kepada masyarakat plural untuk menggunakan pendekatan multikultural. Dimana pendekatan multikultural dapat menjadikan masyarakat mencapai keseimbangan antara keragaman dan toleransi dalam perbedaan. Hal ini menjadi sangat penting untuk diterapkan mengingat kita yang hidup dan dihadapi dengan era multikultural yang menjadi suatu keniscayaan.⁷

Pendidikan memiliki peluang yang besar dalam menginternalisasikan nilai-nilai multikultural, terutama pendidikan Islam. Sifat multikultural sejalan dengan nilai-nilai agama Islam, dimana Islam lahir dan berkembang di suku dan bangsa Arab yang plural.⁸ Contohnya nilai multikultural yang diterapkan Nabi Muhammad SAW pada peristiwa “Piagam Madinah”. Piagam Madinah merupakan suatu langkah dan kebijakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berada di Madinah dan dihadapkan dengan masyarakat yang pluralis dan multikultural. Kebijakan ini merupakan suatu solusi dalam mengatasi problematika yang terjadi akibat perbedaan di tengah masyarakat. Dimana Piagam Madinah merupakan suatu cara Nabi untuk menyatukan masyarakat yang plural. Pada akhirnya, konsep ini menjadi contoh dan pijakan dalam membangun masyarakat sebelum konsep-konsep pembentukan Negara di dunia hadir.⁹

Problematika multikultural yang kerap muncul di Indonesia adalah konflik antar agama maupun internal agama itu sendiri. Berbagai macam konflik agama tersebut telah menghiasi kehidupan bermasyarakat di Indonesia sebagai negara yang majemuk. Dimana konsep multikultural dijadikan sebagai komoditas yang pasti memiliki sisi positif maupun

⁶ Suluri Suluri, “Pendidikan Multikulturalisme Dalam Islam,” *Religi: Jurnal Studi Agama Agama* 15, no. 1 (2019): 77–78, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/rejusta.2019.1501-05>.

⁷ Agus Bassar Samsul, Uus Ruswandi, and Muhammad Erihadiana, “Pendidikan Islam: Peluang Dan Tantangan Di Era Global Dan Multikultural,” *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 8, no. 1 (2021): 68, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jpai>.

⁸ Samsul, Ruswandi, and Erihadiana, 68.

⁹ Uswatun Hasanah and Heni Verawati, “Pendidikan Islam Multikultural: Analisis Historis Masa Dinasti Abbasiyah,” *Journal of Social Science and Education* 3, no. 2 (2022): 207, <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/asanka.v3i2.4847>.

negatif. Problematika tersebut timbul karena dua faktor, yaitu 1) Faktor internal yang berangkat dari agama itu sendiri, seperti kefanatikan dan teologi agama yang berlebihan; dan 2) Faktor eksternal yang berasal dari luar agama, baik itu karena faktor ekonomi, sosial maupun politik.¹⁰

Menurut Stephen Hill, pendidikan multikultural di Indonesia harus memiliki beberapa peran utama, yaitu 1) Pendidikan multikultural berperan sebagai sarana dalam menyelesaikan konflik; Pendidikan multikultural dapat menjadikan siswa asing terhadap budayanya masing-masing; dan 3) Pelaksanaan pendidikan multikultural relevan dengan keadaan Indonesia sebagai negara yang demokratis.¹¹ Selain itu, terdapat penelitian terdahulu yang menyatakan, bahwa pendidikan multikultural merupakan bagian dari implementasi kurikulum merdeka yang disebut dengan program Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Program P5 memiliki salah satu dimensi, yaitu berkebhinekaan global. Dimana dimensi tersebut mempertahankan nilai luhur, lokalitas dan identitasnya yang meliputi keterampilan dalam berkomunikasi antar lintas budaya orang lain, serta refleksi dan tanggung jawab atas pengalaman tentang keberagaman.¹²

Berdasarkan penelitian terdahulu, Al-Qur'an menjelaskan dan mengakui keberagaman sebagai sunnatullah. Catatan sejarah menyatakan bahwa pendidikan Islam multikultural telah ada sejak masa Rasulullah SAW, khususnya pada peristiwa Piagam Madinah. Dimana peristiwa Piagam Madinah menekankan pentingnya saling menghormati dan mengenal di tengah perbedaan. Penelitian ini menekankan urgensi pendidikan multikultural dalam perspektif Islam.¹³ Selain itu, salah satu penelitian terdahulu lainnya juga berusaha untuk mengetahui relevansi pemikiran tokoh Abdurrahman Wahid tentang pendidikan multikultural terhadap pendidikan Islam. Dimana pendidikan Islam tidak hanya murni mengajarkan tentang ajaran Islam saja, melainkan juga harus berfokus

¹⁰ Aretsa Zana Ayunda et al., "Tantangan Multikulturalisme Di Indonesia: Menyoal Relasi Agama Dan Ruang Publik," *ALSYS: Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan* 2, no. 1 (2022): 8, <https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/alsys>.

¹¹ Sipuan Sipuan et al., "Pendekatan Pendidikan Multikultural," *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 2 (2022): 827, <https://ejournal.pps.ung.ac.id/index.php/Aksara%0APendekatan>.

¹² Indah Kusuma Wardani et al., "Implementasi Pendidikan Multikultural Dan Relevansinya Dengan Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar," *Didaktika: Jurnal Kependidikan* 13, no. 2 (2024): 2623, <https://doi.org/https://doi.org/10.58230/27454312.625>.

¹³ Hisan Mursalin, Abdul Mu'ti, and R Alpha Amirrachman, "Pendidikan Multikultural Dalam Perspektif Islam," *Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam* 8, no. 2 (2024): 633, <https://doi.org/10.37274/rais.v8i2.1068>.

pada keberagaman budaya dan religiusitas yang mampu menghargai perbedaan sebagai sumber kekayaan.¹⁴

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu sebelumnya adalah berusaha mengkaji relevansi nilai multikultural pada peristiwa Piagam Madinah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan kurikulum merdeka untuk pendidikan Islam di era multikultural saat ini. Dimana beberapa penelitian sebelumnya hanya sebatas mengetahui konsep pendidikan Islam multikultural pada peristiwa Piagam Madinah sebagai landasan perspektif Islam dan terdapat penelitian terdahulu juga yang mengkaji pemikiran tokoh Islam serta relevansinya terhadap pendidikan Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Sejarah dan nilai multikultural pada peristiwa Piagam Madinah; 2) Peran kurikulum merdeka dalam melaksanakan pendidikan multikultural; dan 3) Relevansi nilai pendidikan multikultural pada peristiwa Piagam Madinah dan kurikulum merdeka untuk pendidikan Islam di era multikultural. Penelitian ini berusaha untuk mengacu nilai pendidikan Islam multikultural peristiwa Piagam Madinah dan kurikulum merdeka yang diharapkan dapat membantu praktis pendidikan multikultural untuk pendidikan Islam di era multikultural saat ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (Library Research). Menurut Sugiyono, penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis dari referensi atau literatur ilmiah yang membahas tentang budaya, norma dan nilai yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.¹⁵ Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengumpulkan sumber informasi penelitian, baik berupa buku, artikel jurnal, laporan maupun sumber-sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan topik kajian penelitian dalam memperoleh pemahaman yang komprehensif.

Langkah-langkah dalam penelitian kepustakaan menurut Mirshad memiliki empat tahapan, yaitu 1) Mencatat masalah penelitian atau temuan baru (Novelty) yang didapatkan pada setiap literatur-literatur yang telah dikumpulkan; 2) Mengintegrasikan teori maupun temuan baru; 3) Menganalisis berbagai kelebihan dan kekurangan isi keseluruhan dari

¹⁴ Ayu Nurfitriani, M. Nador, and Syaripudin Basyar, "Pendidikan Multikultural Abdurrahman Wahid Serta Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam," *AT-TAJDID: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 8, no. 1 (2024): 312, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24127/att.v8i1.3376>.

¹⁵ Rita Kumala Sari, "Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia," *Jurnal Borneo Humaniora* 4, no. 2 (2021): 62, https://doi.org/https://doi.org/10.35334/borneo_humaniora.v4i2.2249.

setiap sumber atau literatur yang dibahas di dalamnya; dan 4) Mengkritisi beberapa hasil penelitian dari beberapa literatur yang dikumpulkan, serta memberikan gagasan atau temuan baru dalam mengkolaborasikan pemikiran-pemikiran yang berbeda terhadap masalah penelitian.¹⁶

Penelitian ini tidak melibatkan kegiatan observasi maupun eksperimen secara langsung, melainkan menggunakan data sekunder yang tersedia di berbagai sumber informasi akademis yang kredibel. Dalam penelitian ini menyajikan beberapa fokus penelitian, yang terdiri dari 1) Sejarah dan nilai multikultural pada peristiwa Piagam Madinah; 2) Peran kurikulum merdeka dalam melaksanakan pendidikan multikultural; dan 3) Relevansi nilai pendidikan multikultural pada peristiwa Piagam Madinah dan kurikulum merdeka untuk pendidikan Islam di era multikultural.

Pembahasan

Sejarah dan Nilai Multikultural pada Peristiwa Piagam Madinah

Kehidupan sosial Kota Madinah pada masa awal Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah terdiri dari tiga kelompok utama. Pertama, para sahabat nabi yang berasal dari Mekah kemudian berhijrah ke Madinah (Kaum Muhajirin) dan penduduk asli Madinah (Kaum Anshar), dimana kedua kaum tersebut merupakan cikal bakal terwujudnya Islam di Madinah. Kedua, Kaum Musyrikin yang merupakan penduduk asli Madinah yang masih enggan untuk memeluk agama Islam, karena masih meyakini ajaran nenek moyangnya. Di sisi lain, sebagian besar Kaum Musyrikin merupakan tokoh-tokoh di kalangan masyarakat. Ketiga, Kaum Yahudi yang merupakan kekuatan utama dalam bidang ekonomi di Madinah. Dimana mereka merupakan kaum pengelola perkebunan dan pedagang.¹⁷

Kota Madinah didominasi oleh orang-orang Yahudi sebelum hadirnya bangsa Arab, baik dari segi politik, ekonomi maupun intelektual. Sehingga, peristiwa hijrah merupakan suatu hal yang mewarnai masyarakat Madinah. Seiring berjalannya waktu, orang-orang Yahudi juga dipengaruhi oleh bangsa Arab di sekitar mereka, dimana ciri-ciri solidaritas kesukuan begitu besar muncul pada Kaum Yahudi, seperti *Asabiyyah*, ketertarikan dalam puisi, kedermawanan dan latihan senjata.

¹⁶ Milya Sari and Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 44, <https://doi.org/https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.

¹⁷ F. Muhammad N., *Mengenal Piagam Madinah* (Bandung: CV Titian Ilmu, 2013), 19; Enur Nurjanah, "Piagam Madinah Sebagai Struktur Masyarakat Pluralistik," *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 16, no. 2 (2019): 211, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v16i2.5913>.

Pada akhirnya, Kaum Yahudi tidak bisa hidup sebagai salah satu kelompok keagamaan dengan berbagai konflik. Alias, Kaum Yahudi merupakan kelompok mayoritas Madinah yang harus mampu menerima perbedaan latar belakang etnis dan sosial politik seiring dengan banyaknya pendatang dari berbagai penjuru kota selain Madinah.¹⁸

Heterogenitas masyarakat Madinah tidak hanya dari sosial ekonomi saja, melainkan juga dari kesukuan dan agama. Dimana dari kesenjangan ekonomi yang tajam dan terdapat solidaritas kesukuan sebagai pemicu konflik yang kuat, serta menjadi penggerak solidaritas di kalangan masyarakat pada belahan bumi ini. Kesamaan agama merupakan sarana dalam menyatukan masyarakat. Namun, hal ini dibantah oleh kondisi yang terjadi di Kota Madinah pada saat Kaum Yahudi yang mendominasi. Dimana suatu perundingan tidak menjadi solusi dalam mengantisipasi konflik. Karena, perjanjian dan kesepakatan yang tidak tertulis mudah untuk dikhianati oleh suatu kelompok pada masa itu. Dari sinilah awal mula mendorong pemikiran untuk membuat perjanjian perdamaian yang dikenal sebagai “Piagam Madinah” sebagai upaya bijaksana untuk mereduksi konflik sosial yang luas dengan disertai sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.¹⁹

Nabi Muhammad SAW merupakan pencetus “Piagam Madinah”. Namun sebelum itu, Nabi Muhammad SAW memberikan penawaran kepada masyarakat Madinah dengan penataan dan penanganan sosial untuk mengatur hubungan antar kelompok suku dan agama, baik mengatur dari segi sosial, ekonomi, politik dan agama. Adapun langkah pertama, yaitu membangun masjid yang difungsikan secara khusus untuk beribadah dan difungsikan secara umum untuk kepentingan Kaum Muslim. Adapun fungsi secara umumnya, antara lain 1) Menampung Kaum Muhajirin yang miskin dan lemah dan belum memiliki tempat tinggal; 2) Sebagai tempat dalam mendalami ilmu agama untuk Kaum Muslim; 3) Sebagai sarana dalam melantunkan syair yang ditujukan untuk dakwah Islam; dan 4) Sebagai sarana dan tempat delegasi dari Negara lain yang hendak bertemu Rasulullah SAW.²⁰

Langkah kedua, yaitu menyatukan Kaum Muhajirin dan Kaum Anshar sebagai upaya mempererat persatuan antar sesama kaum Muslim, serta menghilangkan permusuhan lama diantara kedua belah pihak

¹⁸ Amirotn Sholikhah, “Piagam Madinah, Konsensus Masyarakat Pluralis: Madinah Dan Makkah (Suatu Tinjauan Teori Konflik),” *Komunika: Jurnal Komunikasi Islam* 9, no. 1 (2015): 89–90, <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/komunika.v9i1.832>.

¹⁹ Sholikhah, 90.

²⁰ Aziza Aziz Rahmaningsih, “Konsep Persatuan Bangsa Dalam Piagam Madinah Dengan Konstitusi Indonesia,” *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 3 (2022): 244, <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet/article/view/520>.

tersebut. Dengan demikian, dapat menciptakan persaudaraan yang baik dan efektif antara orang Islam Mekah dan Madinah. Dimana dua langkah sebelumnya merupakan upaya konsolidasi umat Muslim.²¹ Untuk langkah selanjutnya tertuju untuk seluruh penduduk dengan membuat kesepakatan dan perjanjian Piagam Madinah yang menekankan persatuan antara Kaum Muslim dan Kaum Yahudi. Di sisi lain, Piagam Madinah merupakan kontrak sosial pertama dalam sejarah Islam yang menyatukan Kaum Muslim dan Kaum Yahudi. Isi dari Piagam tersebut adalah memberikan kebebasan dalam beragama bagi semua golongan, terdapat persamaan hak dan kewajiban bagi semua golongan untuk kehidupan sosial politik dan ekonomi demi mewujudkan pertahanan dan perdamaian, menekankan kerjasama dan menetapkan kewenangan Rasulullah SAW sebagai penengah dalam suatu konflik yang muncul, serta memutuskan segala perbedaan pendapat di antara semua golongan. Sehingga, Piagam Madinah merupakan perjanjian yang dimiliki oleh semua pihak, baik dari Kaum Muslim maupun semua masyarakat Madinah.²²

Piagam Madinah merupakan bentuk ikhtiar sungguh-sungguh Nabi Muhammad SAW dalam mewujudkan nilai toleransi. Nabi juga menekankan kepada umatnya dan kabilah yang hidup sebagai masyarakat Madinah, bahwa kepemimpinannya sebagai kepala Negara akan mengedepankan prinsip toleransi, baik pada internal agama maupun toleransi antar agama dan kabilah. Kota Madinah merupakan tempat yang baik dalam menerapkan kebijakan sosial politik tersebut, dimana masyarakatnya memiliki kesiapan mental dan kepedulian untuk menerima kebaikan. Justru sebaliknya dengan penduduk Mekah yang berhati keras dan tidak mudah meyakini ajaran tentang perdamaian dan kebenaran.²³

Piagam Madinah memuat prinsip-prinsip inklusivisme yang menekankan hidup berdampingan dengan adil, damai dan rukun, toleransi yang tinggi dan semangat pluralisme. Sehingga, Nabi Muhammad SAW telah menjalankan visi dan misi sebagai Nabi sekaligus pemimpin negara yang bijak dan arif. Dalam hal ini, tidak salah bahwa sejarawan Barat yang bernama William Montgomery Watt menjuluki Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi sekaligus Negarawan yang

²¹ Vrisko Putra Vachruddin, "Konsepsi Dan Strategi Muhammad SAW Dalam Mendirikan Negara Madinah Al-Munawwarah," *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan* 5, no. 1 (2021): 77–78, <https://doi.org/https://doi.org/10.29408/fhs.v5i1.3355>.

²² Rahmaningsih, "Konsep Persatuan Bangsa Dalam Piagam Madinah Dengan Konstitusi Indonesia," 244.

²³ Zuhairi Misrawi, *MADINAH: Kota Suci, Piagam Madinah Dan Teladan Muhammad SAW* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2018), 240.

tertulis dalam bukunya yang masyhur dengan judul “*Muhammad: Prophet and Statesman*”.²⁴

Berdasarkan analisis metode historis secara komprehensif tentang Piagam Madinah di bawah kepemimpinan Nabi sebagai kepala negara, maka Piagam Madinah terdiri dari beberapa prinsip tentang hak asasi dan politik pemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut berisi tentang prinsip umat, yang mencakup prinsip persatuan, persaudaraan, kebebasan dan hubungan antar pemeluk agama, hidup bertetangga, tolong menolong, serta prinsip perdamaian, pertahanan, kepemimpinan, musyawarah, pelaksanaan hukum, prinsip ketakwaan dan prinsip amar ma’ruf nahi munkar. Dimana prinsip-prinsip tersebut merupakan landasan pemikiran dalam ilmu sosial dan politik.²⁵

Piagam Madinah telah membuktikan, bahwasanya Rasulullah SAW telah membangun peradaban yang luar biasa, dimana baginda Nabi telah berhasil membangun proyek sosial pluralis dengan masyarakat yang multi-agama dan multi-etnik.²⁶ Selain itu, Kota Madinah menjadi kota yang bertanggung jawab dalam memikul kewajiban menjaga keamanan, menjamin keselamatan dan ancaman musuh dari luar. Di sisi lain, masyarakat Madinah dapat melestarikan budaya sosial dengan saling tolong menolong, menghormati dan memelihara hak-hak masing-masing.²⁷

Dengan adanya Piagam Madinah, maka Madinah dan beberapa kawasan sekitarnya tidak lagi berstatus sebagai kota. Namun, telah menjadi Negara yang terbentuk atas kesepakatan Piagam Madinah, sehingga Kota Madinah berubah status menjadi ibukota Negara yang dipimpin oleh Rasulullah SAW yang dihuni oleh kabilah multi-etnik dan agama. Piagam Madinah dapat menciptakan peradaban negara Islam pertama di dunia, serta menjadi asal usul Negara Islam yang berperan penting untuk sejarah umat Islam di masa yang akan datang.²⁸

²⁴ Sholikhah, “Piagam Madinah, Konsensus Masyarakat Pluralis: Madinah Dan Makkah (Suatu Tinjauan Teori Konflik),” 94.

²⁵ Sholikhah, 96.

²⁶ Muhammad Kaulan Karima et al., “Telaah Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Pertama Dunia,” *PENDIS: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2023): 45, <https://doi.org/https://doi.org/10.61721/pendis.v2i1.216>.

²⁷ Nurjanah, “Piagam Madinah Sebagai Struktur Masyarakat Pluralistik,” 214.

²⁸ Rooby Pangestu Hari Mulyo, “Piagam Madinah: Misi Keagamaan Dan Kenegaraan,” *OASIS: Jurnal Ilmiah Kajian Islam* 7, no. 2 (2023): 45, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/oasis.v7i2.12809>; Nurjanah, “Piagam Madinah Sebagai Struktur Masyarakat Pluralistik,” 214.

Peran Kurikulum Merdeka dalam Melaksanakan Pendidikan Multikultural

Kurikulum memiliki peran penting dalam mencapai kemajuan pendidikan yang terus meningkat pada setiap zamannya, terutama pelaksanaan kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang ada di Indonesia. Secara historis, kurikulum telah diterapkan sejak masa penjajahan Belanda, dimana kurikulum merupakan bagian resmi di sekolah pada saat itu. Kurikulum merupakan sarana dalam mencapai tujuan pendidikan sekaligus menjadi rujukan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Kurikulum merupakan dasar atau pandangan hidup suatu bangsa, karena bentuk kehidupan suatu bangsa ditentukan oleh kurikulum yang digunakan negara tersebut.²⁹

Perubahan kurikulum merupakan suatu keniscayaan yang bertujuan untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya yang memiliki beberapa faktor dalam mempengaruhinya. Dalam hal ini, peran pengembangan kurikulum berkedudukan penting dalam merespon tuntutan perkembangan ilmu dan teknologi, perubahan struktural pemerintahan dan globalisasi. Selain itu, pengembangan kurikulum harus memiliki SDM yang mendukung dalam pelaksanaannya. Dimana pengembangan dan pembinaan SDM merupakan upaya penting dalam merealisasikan kurikulum, baik melalui jalur formal maupun nonformal. Pada belakangan ini, pengembangan kurikulum terakhir yang ada di Indonesia adalah “Kurikulum Merdeka” sebagai penyempurna kurikulum sebelumnya, yaitu “Kurikulum 2013”.³⁰

Kurikulum Merdeka ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbud Ristek RI) pada tahun 2022 sebagai kurikulum nasional. Dimana dalam kurikulum ini, pembelajaran intrakurikuler yang beragam dapat memaksimalkan diseminasi pendidikan di Indonesia. Adapun, Motto Kurikulum Merdeka yaitu “Belajar merdeka, guru penggerak”. Beberapa kelebihan program kurikulum merdeka, antara lain: 1) Membuat sistem pendidikan lebih mudah beradaptasi, tanpa ada batasan untuk berubah; 2) Memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar mendalami pelajaran yang telah mereka pelajari; 3) Memberikan tempat untuk belajar, serta mengeksplorasi pengetahuan umum dan melibatkan masyarakat; dan 4)

²⁹ Farah Dina Insani, “Sejarah Perkembangan Kurikulum Di Indonesia Sejak Awal Kemerdekaan Hingga Saat Ini,” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam Dan Pendidikan* 8, no. 1 (2019): 44, <https://doi.org/https://doi.org/10.51226/assalam.v8i1.132>.

³⁰ Alhamuddin Alhamuddin, “Sejarah Kurikulum Di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pengembangan Kurikulum),” *Nur El-Islam: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 2 (2014): 54, <https://ejournal.iainyasnibungo.ac.id/index.php/nurelislam/article/view/60>.

Membantu siswa dalam menyiapkan kebutuhan hidup untuk ke depannya, terutama dalam menghadapi dunia kerja.³¹

Spesifikasi program Kurikulum Merdeka adalah Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Program P5 idealnya diwujudkan dan dikembangkan untuk siswa yang memuat enam kompetensi sebagai dimensi kunci, antara lain: 1) Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia; 2) Berkebhinekaan Global; 3) Bergotong royong; 4) Mandiri; 5) Bernalar Kritis; dan 6) Kreatif. Adapun, langkah-langkah pelaksanaan program P5 didasarkan pada panduan alur perencanaan P5. Langkah-langkah pengembangan P5, yaitu 1) Membentuk tim fasilitator; 2) Mengidentifikasi kesiapan satuan pendidikan; 3) Menetapkan tema, dimensi dan alokasi waktu; 4) Membuat modul proyek; dan 5) Merancang strategi pelaporan hasil proyek.³²

Salah satu dimensi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), yaitu “Berkebhinekaan global” merupakan dimensi yang menekankan pendidikan multikultural. Dimensi ini berusaha untuk menunjukkan pemahaman dalam melestarikan budaya masing-masing tanpa adanya bentuk diskriminasi antar budaya. Selain itu, dimensi berkebhinekaan global dapat mengembangkan kecakapan berkomunikasi antar budaya, menumbuhkan rasa saling menghormati, menyelaraskan perbedaan budaya, menghargai dan memahami perbedaan perspektif, serta mampu menekankan prinsip demokrasi dan berkeadilan sosial dalam membangun masyarakat yang inklusif.³³

Secara keseluruhan, Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) muncul atas dasar pemahaman kritis, bahwasanya pendidikan perlu terhubung dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan prinsip Ki Hajar Dewantara yang memprioritaskan kepentingan utama dari pengalaman langsung untuk proses pembelajaran. Adapun, tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis, mandiri, kreatif dan menekankan kesadaran terhadap nilai-nilai pancasila yang relevan dengan kebutuhan masa depan mereka, serta sebagai sarana dalam mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi yang memahami

³¹ Dini Febriyenti et al., “Perkembangan Kurikulum Di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah,” *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2023): 210–11, <https://doi.org/https://doi.org/10.54437/alidaroh.v7i2.932>.

³² Tia Nafaridah et al., “Analisis Kegiatan P5 Sebagai Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi Pada Kurikulum Merdeka Era Digital Di SMA Negeri 2 Banjarmasin,” in *Seminar Nasional (PROSPEK II) “Transformasi Pendidikan Melalui Digital Learning Guna Mewujudkan Merdeka Belajar,”* vol. 2, 2023, 92, <https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/prospek/article/view/2583>.

³³ Rizky Satria et al., *Panduan Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila* (Jakarta: Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022), 49.

keberagaman dan keunikan siswa. Dalam hal ini, pendidik berperan sebagai fasilitator yang wajib memfasilitasi potensi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing.³⁴

Relevansi Nilai Pendidikan Multikultural pada Peristiwa Piagam Madinah dan Kurikulum Merdeka untuk Pendidikan Islam di Era Multikultural

Konsep Ummah merupakan konsep yang terdapat di Piagam Madinah yang mengajarkan, bahwa keberagaman tidak menjadi penghalang dalam melakukan persatuan. Lebih jelasnya, ruang lingkup dan makna konsep Ummah digunakan ke dalam dua model dengan klausul yang berbeda, yaitu 1) Menunjukkan komunitas yang seagama, seperti penyebutan umat Islam, Yahudi dan sebagainya; dan 2) Menunjukkan kelompok pluralistik, seperti ras, suku dan agama yang terdapat dalam kesatuan politik. Maka, peran Piagam Madinah adalah menjadi jalan tengah agar tidak memihak kepada kelompok tertentu yang menekankan keadilan bagi masyarakat Madinah yang multi-agama, multi-etnis, multikultur dari masyarakat yang heterogen dan plural.³⁵

Berdasarkan historis, Piagam Madinah dan kondisi penduduknya yang dikaitkan dengan kondisi Indonesia pada saat ini. Maka, memiliki daya relevansi yang kuat. Pertama, dari segi masyarakat, Indonesia memiliki masyarakat yang pluralis dan multikultural, dimana Indonesia memiliki masyarakat dengan keberagaman yang kompleks dari berbagai bahasa, suku, ras maupun agama yang menghargai satu sama lain, terutama bagi umat yang beragama. Sehingga, nilai-nilai Piagam Madinah dapat diimplementasikan di Indonesia. Kedua, Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang demokratis, dimana Piagam Madinah menekankan konsep Ummah dalam mengajarkan persatuan yang memahami komunitas warga sebagai landasan demokratis. Ketiga, kondisi masyarakat Indonesia yang rentan dengan berbagai konflik, jika dikaitkan dengan latar belakang munculnya Piagam Madinah adalah karena munculnya berbagai konflik di lingkup masyarakat Madinah pada saat itu yang bertujuan menjaga persatuan dan perdamaian. Keempat, Indonesia memiliki dasar Negara yang dapat menyatukan berbagai macam ras, suku, agama dan budaya, seperti halnya Piagam Madinah yang dapat

³⁴ Puji Dinda Melati et al., "Implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Dalam Kurikulum Merdeka Di Sekolah Menengah Atas (SMA)," *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 6, no. 4 (2024): 2809–10, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i4.6762>.

³⁵ Muhammad Nur Murdan and Haiwannisa Haiwannisa, "Membangun Hubungan Antara Ummat Dan Kekuasaan Konsep Negara Dalam Piagam Madinah," *Sustainability (Switzerland)* 1, no. 1 (2019): 54, <https://doi.org/https://doi.org/10.46870/jiat.v1i1.59>; Luqman Rico Khashogi, "Konsep Ummah Dalam Piagam Madinah," *Jurnal Agama Dan Hak Asazi Manusia* 2, no. 1 (2012): 107, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/inright.v2i1.1234>.

mempersatukan penduduk Madinah yang pluralis dan multikultural dari berbagai macam kelompok sosial.³⁶

Dewasa ini, Indonesia telah berganti berbagai macam kurikulum dan sampai pada yang terakhir yaitu kurikulum merdeka. Dimana kurikulum merdeka memiliki program Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang terdiri dari enam dimensi utama, antara lain: 1) Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia; 2) Berkebhinekaan Global; 3) Bergotong royong; 4) Mandiri; 5) Bernalar Kritis; dan 6) Kreatif. Program P5 bertujuan untuk menghasilkan sistem pendidikan yang sesuai dengan kompetensi, yang mengedepankan identitas, ideologi, latar belakang dan tantangan yang terjadi di Indonesia saat ini.³⁷ Pada penelitian ini berusaha untuk mengkaji dimensi “Berkebhinekaan Global” yang memiliki daya relevansi kuat dengan nilai multikultural dalam Piagam Madinah.

Dimensi kebhinekaan global memiliki beberapa nilai-nilai yang menekankan prinsip multikulturalisme, dimana program P5 menekankan kompetensi kecakapan dalam berkomunikasi antar budaya, menekankan prinsip demokrasi, menyelaraskan perbedaan budaya, memahami perbedaan perspektif dan mampu menumbuhkan rasa saling menghormati, serta menekankan prinsip demokrasi dan berkeadilan sosial dalam membangun masyarakat yang inklusif. Hal ini selaras dengan nilai-nilai multikultural dalam Piagam Madinah yang menekankan prinsip toleransi atas keberagaman ras, suku maupun agama, menjunjung tinggi keadilan sosial dan penduduk Madinah memiliki kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat, serta memiliki persamaan hak dan kewajiban yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan untuk semua kelompok sosial di Madinah.³⁸

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) memiliki signifikansi dalam mencapai tujuan pendidikan multikultural. Selain itu, pelaksanaan program P5 tidak terintegrasi pada setiap mata pelajaran, karena setiap mata pelajaran memiliki bagian khusus, dimana siswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi minat dan bakat mereka masing-masing, seperti keterampilan sikap merdeka yang dapat diperoleh melalui guru maupun

³⁶ Ahmad Zayyadi, “Sejarah Konstitusi Madinah Nabi Muhammad Saw (Analisis Piagam Madinah Dan Relevansinya Di Indonesia),” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2015): 194, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/sh.v4i1.1976>.

³⁷ Annisa Intan Maharani, Istiharoh Istiharoh, and Pramasheila Arinda Putri, “Program P5 Sebagai Implementasi Kurikulum Merdeka: Faktor Penghambat Dan Upayanya,” *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2023): 180, <https://doi.org/https://doi.org/10.59024/atmosfer.v1i2.153>.

³⁸ St. Jabal Rahmah, “Unsur-Unsur Multikultural Dalam Piagam Madinah” (Universitas Islam Alauddin Makassar, 2018), 74, <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/13451/>.

tokoh masyarakat yang mengkaji isu terkini yang terjadi di lingkungan sekitarnya.³⁹ Program P5 merupakan suatu upaya Negara Indonesia dalam mengedepankan konsep identitas sosial untuk masyarakatnya yang diajarkan sejak dini kepada para pelajar/siswa yang duduk dibangku sekolah. Sehingga, upaya ini memiliki peluang untuk mencetak generasi yang paham dengan konsep multikultural yang mengedepankan identitas sosial untuk Indonesia di masa yang akan datang.

Pernyataan di atas sejalan dengan teori yang dicetuskan oleh Tajfel tentang identitas sosial yang menyatakan bahwa, identitas sosial merupakan bagian konsep diri seseorang yang berdasarkan pengetahuannya dapat menyadari, bahwa mereka sebagai anggota dalam suatu kelompok sosial yang mempunyai signifikansi nilai dan emosional, serta memiliki rasa peduli dan bangga terhadap status keanggotaan sosialnya tersebut. Adapun dari pendapat White yang menyatakan, bahwa identitas sosial merupakan gambaran diri individu tentang siapa dirinya, konsep diri dan keanggotaan dalam kelompok yang didapatkan melalui kategori sosial tempatnya berada.⁴⁰

Lebih spesifikasinya dalam konteks pembelajaran, Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran penting dalam menunjang program P5 yang berbasis pendidikan multikultural pada lembaga-lembaga pendidikan Islam. Dimana implementasi Pendidikan Agama Islam memiliki beberapa nilai dan strategi yang memperhatikan kebutuhan dan karakteristik, serta tantangan yang dihadapi oleh generasi saat ini, yaitu 1) Pendekatan inklusif yang menekankan nilai-nilai toleransi dalam Islam; 2) Penguatan karakter dan etika untuk menghadapi situasi kehidupan yang nyata; 3) Pemberdayaan sosial yang mengajarkan kepedulian terhadap sesama tanpa memandang suatu perbedaan; 4) Menekankan prinsip demokratis; dan 5) Pelatihan keterampilan hidup yang relevan dengan masyarakat saat ini, seperti komunikasi yang efektif dengan keberagaman masyarakat yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan pembelajaran.⁴¹

Dari pemaparan pembahasan di atas dapat disimpulkan, bahwa penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang

³⁹ Maharani, Istiharoh, and Putri, "Program P5 Sebagai Implementasi Kurikulum Merdeka: Faktor Penghambat Dan Upayanya," 179–80.

⁴⁰ Mahesa Diaz Wibisono and Musdalifah Musdalifah, "Pengembangan Skala Identitas Sosial: Validitas, Dan Analisis Faktor Konfirmatori," *Jurnal Unissula* 15, no. 1 (2020): 59, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jp.15.1.58-67>.

⁴¹ Azzy Alhanin et al., "Posisi Pendidikan Agama Islam Dalam Menghadapi Problematika Masyarakat Modern," *Social Science Academic* 2, no. 1 (2024): 93–94, <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/ssa.v2i1.4828>; Masykuri Bakri, Hambali Hambali, and Agus Sulthoni Imami, "Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Multikultural Melalui Edu-Ekowisata," *Muróbbi: Jurnal Ilmu Pendidikan* 5, no. 1 (2015): 122–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.52431/murobbi.v5i1.378>.

membahas tentang Piagam Madinah yang selaras dengan konteks Indonesia saat ini, yang meliputi keberagaman penduduk, kerentanan konflik, pemerintahan yang demokratis dan dasar Negara yang mampu mengedepankan keadilan dan perdamaian untuk penduduknya. Selain itu, nilai-nilai multikultural Piagam Madinah selaras dengan program P5 khususnya pada dimensi “Berkebhinekaan Global” yang menekankan pendidikan multikultural dalam memahami konsep keberagaman, serta sebagai upaya dalam mengedepankan identitas sosial bangsa. Lebih spesifiknya, nilai-nilai dan strategi Pendidikan Agama Islam (PAI) juga berperan penting dalam menunjang program P5 yang berusaha untuk memahami perbedaan, toleransi, mengutamakan karakter dan etika, serta mendorong rasa empati dan simpati terhadap masyarakat tanpa memandang sebuah perbedaan.

Penutup

Peristiwa Piagam Madinah merupakan cikal bakal lahirnya negara demokratis. Selain itu, Piagam Madinah merupakan bentuk ikhtiar kesungguhan Nabi Muhammad SAW dalam mewujudkan nilai toleransi. Dimana tujuan Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah untuk misi perdamaian dan keadilan bagi penduduk Madinah. Karena, Madinah memiliki masyarakat yang pluralis dan multikultural, serta rentan terhadap kemunculan konflik, sehingga Madinah bukan lagi berstatus sebagai Kota, melainkan menjadi negara yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW sekaligus menciptakan peradaban Islam sebagai negara Islam pertama di dunia yang dilandasi oleh Piagam Madinah sebagai persatuan hak keadilan sosial dari berbagai macam keberagaman.

Kurikulum merdeka merupakan kurikulum paling mutakhir yang digunakan Negara Indonesia pada saat ini. Dalam programnya, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) menjadi salah satu upaya dalam menginternalisasikan pemahaman tentang konsep multikultural, khususnya yang terdapat pada salah satu dimensi utama program P5, yaitu dimensi “Berkebhinekaan Global” yang berusaha untuk mengembangkan kecakapan berkomunikasi antar budaya, menumbuhkan rasa saling menghormati, menyelaraskan perbedaan budaya, menghargai dan memahami perbedaan perspektif, serta mampu menekankan prinsip demokrasi dan berkeadilan sosial dalam membangun masyarakat yang inklusif.

Program Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) merupakan upaya Negara Indonesia dalam menguatkan identitas sosial bangsa yang ditunjang oleh strategi dan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam. Jika dikaitkan dengan keadaan Indonesia saat ini, yaitu penduduk yang heterogen, kerentanan kemunculan konflik, negara yang demokratis dan

memiliki landasan negara. Maka, nilai-nilai multikultural peristiwa Piagam Madinah dan kurikulum merdeka memiliki daya relevansi yang kuat dengan mengutamakan prinsip multikultural yang mengajarkan nilai persatuan, nilai demokratis, nilai toleransi, nilai persamaan hak, serta nilai empati dan simpati terhadap keberagaman multi-etnis maupun multi-agama.

Daftar Pustaka

- Alhamuddin, Alhamuddin. “Sejarah Kurikulum Di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pengembangan Kurikulum).” *Nur El-Islam: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 2 (2014): 48–58. <https://ejournal.iaiyasribungo.ac.id/index.php/nurelislam/article/view/60>.
- Alhanin, Azzy, M. Faza Al Fitri, Hefik Nadzif Ulfiyah S, and Arini Haminati. “Posisi Pendidikan Agama Islam Dalam Menghadapi Problematika Masyarakat Modern.” *Social Science Academic* 2, no. 1 (2024): 89–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/ssa.v2i1.4828>.
- Amin, Muh. “Pendidikan Multikultural.” *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 9, no. 1 (2018): 24–34. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/5020>.
- Awwaliyah, Robiatul, and Hasan Baharun. “Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Telaah Epistemologi Terhadap Problematika Pendidikan Islam).” *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA* 19, no. 1 (2018): 34–49. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jid.v19i1.4193>.
- Ayunda, Aretsa Zana, Santi Mahmuda Urbaningkrum, Afaf Wafiqoh Nusaiabah, Widya Septiana, Saesari Salekhah Nur Widayani, and Arief Rahman H. “Tantangan Multikulturalisme Di Indonesia: Menyoal Relasi Agama Dan Ruang Publik.” *ALSYS: Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan* 2, no. 1 (2022): 1–18. <https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/alsys>.
- Bakri, Masykuri, Hambali Hambali, and Agus Sulthoni Imami. “Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Multikultural Melalui Edu-Ekowisata.” *Muróbbi: Jurnal Ilmu Pendidikan* 5, no. 1 (2015): 103–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.52431/murobbi.v5i1.378>.

- Febriyenti, Dini, Nabila Putri, Asmendri Asmendri, and Milya Sari. "Perkembangan Kurikulum Di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah." *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2023): 195–214. <https://doi.org/https://doi.org/10.54437/alidaroh.v7i2.932>.
- Hasanah, Uswatun, and Heni Verawati. "Pendidikan Islam Multikultural: Analisis Historis Masa Dinasti Abbasiyah." *Journal of Social Science and Education* 3, no. 2 (2022): 198–221. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/asanka.v3i2.4847>.
- Ibrahim, Rustam. "Pendidikan Multikultural: Pengertian, Prinsip, Dan Relevansinya Dengan Tujuan Pendidikan Islam." *Jurnal Addin: Media Dialektika Ilmu Islam* 7, no. 1 (2013): 129–54. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/addin.v7i1.573>.
- Insani, Farah Dina. "Sejarah Perkembangan Kurikulum Di Indonesia Sejak Awal Kemerdekaan Hingga Saat Ini." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam Dan Pendidikan* 8, no. 1 (2019): 43–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.51226/assalam.v8i1.132>.
- Karima, Muhammad Kaulan, Sheila Megarani, Jelita Suryani Siregar, Faradilla Diwanta, Putri Suci Ramadiah, Dinda Agus Tantri, Nabilah Aprilia Marwa, et al. "Telaah Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Pertama Dunia." *PENDIS: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2023): 35–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.61721/pendis.v2i1.216>.
- Khashogi, Luqman Rico. "Konsep Ummah Dalam Piagam Madinah." *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 2, no. 1 (2012): 93–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/inright.v2i1.1234>.
- Maharani, Annisa Intan, Istiharoh Istiharoh, and Pramasha Arinda Putri. "Program P5 Sebagai Implementasi Kurikulum Merdeka: Faktor Penghambat Dan Upayanya." *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2023): 176–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.59024/atmosfer.v1i2.153>.
- Melati, Puji Dinda, Eko Puspita Rini, Musyayadah Musyayadah, and Firman Firman. "Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Dalam Kurikulum Merdeka Di Sekolah Menengah Atas (SMA)." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 6, no. 4 (2024): 2808–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i4.6762>.

- Misrawi, Zuhairi. *MADINAH: Kota Suci, Piagam Madinah Dan Teladan Muhammad SAW*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2018.
- Mulyo, Rooby Pangestu Hari. “Piagam Madinah: Misi Keagamaan Dan Kenegaraan.” *OASIS: Jurnal Ilmiah Kajian Islam* 7, no. 2 (2023): 42–53.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/oasis.v7i2.12809>.
- Murdan, Muhammad Nur, and Haiwannisa Haiwannisa. “Membangun Hubungan Antara Ummat Dan Kekuasaan Konsep Negara Dalam Piagam Madinah.” *Sustainability (Switzerland)* 1, no. 1 (2019): 44–68.
<https://doi.org/https://doi.org/10.46870/jiat.v1i1.59>.
- Mursalin, Hisan, Abdul Mu’ti, and R Alpha Amirrachman. “Pendidikan Multikultural Dalam Perspektif Islam.” *Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam* 8, no. 2 (2024): 617–35.
<https://doi.org/10.37274/rais.v8i2.1068>.
- N., F. Muhammad. *Mengenal Piagam Madinah*. Bandung: CV Titian Ilmu, 2013.
- Nafaridah, Tia, Ahmad Ahmad, Lisa Maulidia, Monry Fraick Nicky Gillian Ratumbusang, and Maya Kesumasari Eva. “Analisis Kegiatan P5 Sebagai Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi Pada Kurikulum Merdeka Era Digital Di SMA Negeri 2 Banjarmasin.” In *Seminar Nasional (PROSPEK II) “Transformasi Pendidikan Melalui Digital Learning Guna Mewujudkan Merdeka Belajar,”* 2:84–97, 2023.
<https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/prospek/article/view/2583>.
- Nurfitriani, Ayu, M. Nador, and Syaripudin Basyar. “Pendidikan Multikultural Abdurrahman Wahid Serta Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam.” *AT-TAJDID: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 8, no. 1 (2024): 312–20.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24127/att.v8i1.3376>.
- Nurjanah, Enur. “Piagam Madinah Sebagai Struktur Masyarakat Pluralistik.” *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 16, no. 2 (2019): 210–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v16i2.5913>.
- Prof. Dr. H. Imam Suprayogo. “Kemajemukan Bangsa Indonesia,” 2016.
<https://uin-malang.ac.id/r/160701/kemajemukan-bangsa-indonesia.html>.

- Rahmah, St. Jabal. “Unsur-Unsur Multikultural Dalam Piagam Madinah.” Universitas Islam Alauddin Makassar, 2018. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/13451/>.
- Rahmaningsih, Aziza Aziz. “Konsep Persatuan Bangsa Dalam Piagam Madinah Dengan Konstitusi Indonesia.” *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 3 (2022): 242–49. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet/article/view/520>.
- Samsul, Agus Bassar, Uus Ruswandi, and Muhammad Erihadiana. “Pendidikan Islam: Peluang Dan Tantangan Di Era Global Dan Multikultural.” *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 8, no. 1 (2021): 63–75. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jpai>.
- Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA.” *Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 41–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.
- Sari, Rita Kumala. “Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia.” *Jurnal Borneo Humaniora* 4, no. 2 (2021): 60–69. https://doi.org/https://doi.org/10.35334/borneo_humaniora.v4i2.2249.
- Satria, Rizky, Pia Adiprima, Wulan Kandi Sekar, and Tracey Yani Harjatanaya. *Panduan Pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila*. Jakarta: Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022.
- Sholikhah, Amiroton. “Piagam Madinah, Konsensus Masyarakat Pluralis: Madinah Dan Makkah (Suatu Tinjauan Teori Konflik).” *Komunika: Jurnal Komunikasi Islam* 9, no. 1 (2015): 85–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/komunika.v9i1.832>.
- Sipuan, Sipuan, Idi Warsah, Alfauzan Amin, and Adisel Adisel. “Pendekatan Pendidikan Multikultural.” *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 2 (2022): 815–30. <http://ejournal.pps.ung.ac.id/index.php/Aksara%0APendekatan>.
- Suluri, Suluri. “Pendidikan Multikulturalisme Dalam Islam.” *Religi: Jurnal Studi Agama Agama* 15, no. 1 (2019): 76–86. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/rejusta.2019.1501-05>.

- Suryana, Yaya, and A. Rusdiana. *Pendidikan Multikultural*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Vachruddin, Vrisko Putra. “Konsepsi Dan Strategi Muhammad SAW Dalam Mendirikan Negara Madinah Al-Munawwarah.” *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan* 5, no. 1 (2021): 70–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.29408/fhs.v5i1.3355>.
- Wardani, Indah Kusuma, Aviandri Cahya Nugroho, Bambang Sumardjoko, and Endang Fauzi Ati. “Implementasi Pendidikan Multikultural Dan Relevansinya Dengan Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar.” *Didaktika: Jurnal Kependidikan* 13, no. 2 (2024): 2617–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.58230/27454312.625>.
- Wati, Monica Kurnia, Juwita Melati Sukma, and Asiyah Asiyah. “Teori Pendidikan Multikultural Dan Pendekatan Pendidikan Multikultural.” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 1 (2024): 65–68. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>.
- Wibisono, Mahesa Diaz, and Musdalifah Musdalifah. “Pengembangan Skala Identitas Sosial: Validitas, Dan Analisis Faktor Konfirmatori.” *Jurnal Unissula* 15, no. 1 (2020): 58–67. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jp.15.1.58-67>.
- Zayyadi, Ahmad. “Sejarah Konstitusi Madinah Nabi Muhammad Saw (Analisis Piagam Madinah Dan Relevansinya Di Indonesia).” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2015): 177–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/sh.v4i1.1976>.